

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Presiden Xi Jinping memberlakukan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan membangun kamp reedukasi pada etnis Uighur karena hal tersebut merupakan bentuk Tiongkok dalam mewujudkan keamanan nasionalnya. Kebijakan dan program kamp reedukasi diberlakukan di wilayah Xinjiang dimana tempat mayoritas etnis Uighur bertempat tinggal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk etnis Uighur serta muslim yang berada di wilayah Xinjiang. Pemilihan mengenai siapa yang dapat dikategorikan untuk dimasukkan ke dalam kamp reedukasi bersifat acak dan dilakukan oleh polisi Tiongkok.

Pada mulanya kebijakan Tiongkok untuk menerapkan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* adalah upaya dalam menghentikan aksi teror, menertibkan wilayah, dan menjaga keamanan negaranya. Tetapi seiring dengan berjalannya penerapan kebijakan *Strike Hard*, penulis menemukan bahwa keamanan yang ingin Tiongkok capai melingkupi dalam dan luar wilayah Tiongkok atau keamanan kawasan. Keamanan kawasan tersebut dapat tercapai dengan kerja sama dengan negara-negara disekitar Tiongkok juga menstabilkan posisi Tiongkok. Dari kerja sama tersebut dihasilkanlah keuntungan maksimal yang tentunya juga dari segi ekonomi. Tiongkok berupaya agar etnis Uighur di Xinjiang bisa berkoordinasi dengan baik dalam mewujudkan program besar Tiongkok melakukan kerja sama kawasan yaitu *One Belt One Road*. Keputusan

Tiongkok selaras dengan keinginan Tiongkok untuk melakukan pembangunan yang juga merupakan bagian dari kepentingan nasionalnya.

4.2 Saran

Dalam penjabaran yang telah diuraikan oleh penulis, terlihat bahwa Tiongkok membuat kebijakan berdasarkan pemerintahan pusat dan sangat bergantung kepada dinamika pemerintahan yang sedang berlangsung maupun berdasarkan siapa yang memimpin. Maka sebagai masyarakat internasional pada dasarnya kita tidak dapat berbuat banyak atas pengambilan keputusan yang dilakukan Tiongkok tetapi jika hal tersebut dianggap melanggar batas kewajaran sudah sepatutnya masyarakat internasional memperingati atau mengecam agar negara manapun kembali mengingat batasannya dan kewajibannya sebagai negara yang salah satunya bertugas untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya. Begitu pula Tiongkok harus kembali berkaca pada sejarah dan melihat lebih detail dalam penerapan kebijakannya supaya tidak menimbulkan kerugian kepada warga negaranya sendiri. Selain itu dapat digunakan untuk penulis-penulis selanjutnya jika mereka ingin mengambil topik serupa atau dari perspektif lain mengingat bahwa pemerintahan Tiongkok masih dibawah Presiden Xi Jinping dan pelaksanaan pemerintahannya terus berkembang.